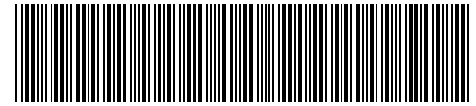




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400535/2023**



DS:7083-8136-3728-5879

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
  3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
  4. Kode>Nama Satker : (400535) PENGADILAN TINGGI PALU
- Sebesar : Rp. 163.322.000 ( SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang  
Rp. 163.322.000  
Rp. 163.322.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |             |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 163.322.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |             | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0           | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |             | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN P A L U (051) Rp. 163.322.000

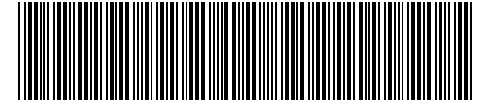
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400535/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7083-8136-3728-5879

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (400535) PENGADILAN TINGGI PALU

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			163.322.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			163.322.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun			
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		6. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
		7. 03	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	8,00	kegiatan	91.752.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	8,00	kegiatan	91.752.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	143,00	Perkara, Berkas Perkara	71.570.000
Rincian Output	:	01	BCA.U06 Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	100,00	Perkara	40.000.000
		02	BCA.U07 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	43,00	Perkara	31.570.000

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR : DIPA- 005.03.2.400535/2023**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7083-8136-3728-5879

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
 Kode>Nama Satker : (400535) PENGADILAN TINGGI PALU

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	163.322.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	163.322.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400535/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7083-8136-3728-5879

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (400535) PENGADILAN TINGGI PALU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400535	PENGADILAN TINGGI PALU	-	163.322	-	-	-	163.322		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	163.322	-	-	-	163.322		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	163.322	-	-	-	163.322		
1049.AEA	Koordinasi (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	91.752	-	-	-	91.752	18 . 51	
01	RM	-	91.752	-	-	-	91.752	051	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	71.570	-	-	-	71.570	18 . 51	
01	RM	-	71.570	-	-	-	71.570	051	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>163.322</b>	-	-	-	<b>163.322</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400535/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7083-8136-3728-5879

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (400535) PENGADILAN TINGGI PALU

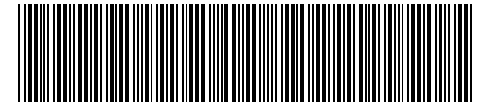
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400535	<b>PENGADILAN TINGGI PALU</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.689	163.322
		<b>BELANJA BARANG</b>	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.689	163.322
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.689	163.322
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.603	13.689	163.322
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	78	870
		- PNBP (425239)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	78	870

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400535/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:7083-8136-3728-5879

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [400535] PENGADILAN TINGGI PALU

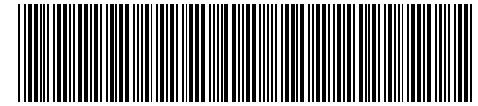
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400535/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:7083-8136-3728-5879

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [400535] PENGADILAN TINGGI PALU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002